



DOKUMEN RENJA TAHUN 2024

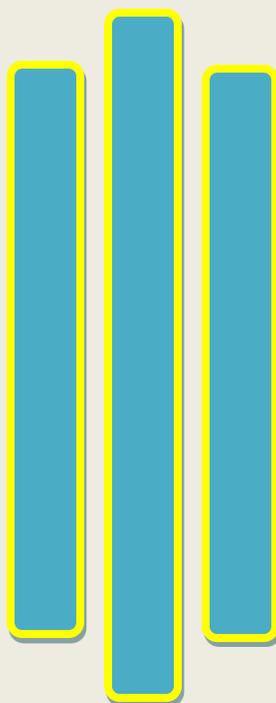


**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA PALANGKA RAYA**



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jalan Ir. Soekarno Komplek Perkantoran Pemko Palangka Raya 73112

DOKUMEN
RENCANA KERJA (RENJA)
DPPKBP3APM



KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2024



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya Telp (0536) 3241242 Fax. 0536- 3241243

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 050/9/DPPKBP3APM/II/2024**

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA**

MEMUTUSKAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 Ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Tahun 2024

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Jangka Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
 5. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);
 10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
 11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA – SOPD) setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran 2024.

KETIGA : Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, meliputi :

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, berisikan kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maupun Indikator Sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SOPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD, berisikan uraian mengenai : Sejuahmana tingkat kinerja pelayanan SOPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SOPD; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SOPD dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai : Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan- temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Telaahan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN, DAN SASARAN SOPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SOPD.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal, 5 Februari 2024

KEPALA DINAS,



dr. M. FITRIYANTO LEKSONO, M.Si
Pembina

NIP. 19820725 200901 1 005

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan kesempatan kepada kita untuk dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2024 ini.

Penyusunan Rencana Kerja adalah suatu keharusan bagi setiap Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam bentuk Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah pada satu tahun kedepan.

Dalam penyelesaian RENJA ini telah disesuaikan dengan alur dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai panduan penulisan dan telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana yang tercantum dalam RPD Kota Palangka Raya dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBP3APM) Tahun 2024-2026.

Demikianlah sebagai pengantar dari kami, semoga dapat dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan, terima kasih.

KEPALA DINAS,


dr. M. FITRIYANTO LEKSONO, M.Si
Pembina
NIP. 19820725 200901 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SOPD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD	12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SOPD	21
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SOPD	21
3.3 Program dan Kegiatan	23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	27

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
BAB V	PENUTUP	31

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu proses yang memerlukan transformasi paradigmatik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan yang utama terletak pada perspektif perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan secara mandiri dan bertanggung jawab dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan perspektif tersebut, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemandirian pemerintah di daerah dalam mengelola pembangunan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah, konservasi lingkungan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Perubahan paradigma pembangunan daerah tersebut juga menegaskan akan perlunya mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang efisien dan efektif dan harus selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, agar apa yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat, maka mekanisme perencanaan harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah.

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dimulai dan disusun secara berjangka yaitu meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Berpedoman pada RPJM selanjutnya Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) menyusun Rencana Strategis (RENSTRA-SOPD) yang memuat visi, misi, tujuan dan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-SOPD) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, memuat kebijakan, program dan rencana kegiatan pembangunan Tahun 2023 baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Melalui mekanisme forum SOPD diharapkan Rancangan Akhir RENJA-SOPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya dapat disinkronkan dan ditetapkan prioritasnya sesuai dengan hasil musyawarah penjaringan aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan (Musrenbang).

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-SOPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya disusun berlandaskan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen resmi perencanaan Daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya khususnya dan pembangunan tahunan pada umumnya.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra, karena penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya berkaitan erat dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan akhir Renja SOPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.5. Latar Belakang

1.6. Landasan Hukum

1.7. Maksud dan Tujuan

1.8. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, berisikan kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja SOPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SOPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SOPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SOPD tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maupun Indikator Sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SOPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD**, berisikan uraian mengenai : Sejuahmana tingkat kinerja pelayanan SOPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SOPD;Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggara kan tugas dan fungsi SOPD dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**, berisikan uraian mengenai : Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan- temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- 2.5. Telaahan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat**, berisikan uraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN, DAN SASARAN SOPD

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**, berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD**, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SOPD.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

B A B II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (RENSTRA). Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. *Penetapan Indikator Kinerja*

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indicator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target Awal Tahun 2023	Target Capaian			Target Akhir Renstra
							Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Mewujudkan Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Fertility (TFR)	$TFR = 5 \sum ASFR_i$ $i=1$ $ASFR_i = \frac{b_i}{P_i f} \times K$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur b_i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu P_i = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama $i=1$ untuk kelompok umur 15-19, $i=2$ untuk kelompok umur 20-24, ..., $i=7$ untuk kelompok umur 45-49 K = bilangan konstanta biasanya 1000	2,00	2,00	1,96	1,96	1,96
			Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Lembaga Kemasyarakatan	Indeks Pemberdayaan Gender	$IDG = \frac{(I_{(par)} + I_{(OM)} + I_{(inc-dis)})}{3}$	98.45	85,94	85,96	85,98	85,98
				% Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang terselesaikan	Jumlah Kasus Perempuan dan Anak yang terselesaikan : Jumlah Kasus Perempuan dan Anak x 100	100	100	100	100	100
				Skor Kota Layak Anak	Skor	700	700	700	700	700

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2023

Berdasarkan DPPA SOPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2023, Pagu Anggaran Belanja sebesar **Rp 15.601.806.660,- (Lima Belas Milyar Enam Ratus Satu Juta Delapan Ratus Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah)** dengan Realisasi keuangan sebesar **Rp. 14.927.830.628 (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)** atau realisasi keuangan sebesar **95,68%**, dengan rincian Belanja terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Capaian (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)
1.	Belanja Operasi	15.377.894.060,-	14.710.930.628,-	100	95,66
2.	Belanja Modal	223.912.600,-	216.900.000,-	100	96,86
3.	Pagu Anggaran	15.601.806.660,-	14.927.830.628,-	100	95,68

Analisa :

Faktor Penunjang Keberhasilan :

1. Kegiatan Pelayanan KB yang dilaksanakan secara gratis kepada masyarakat melalui kampung KB serta adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat melalui dana APBD dan DAK.
2. Terpenuhinya/terlayani kasus-kasus korban kekerasan perempuan dan anak;
3. Mendapat Piagam dan Trophy Penghargaan KLA, PUG, dan RBRA dari Kementerian PPPA serta
4. Mendapat Penghargaan Manggala Kencana dari BKKBN Pusat.

Analisa :

Faktor Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja adalah :

1. Adanya penetapan target indikator kinerja yang terlalu tinggi sehingga tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
2. Adanya beberapa Kegiatan yang bersumber dari dana DAK dan DAK Stunting yang tidak dapat terserap secara maksimal
3. Belum dilengkapinya rumah perlindungan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Tahun Anggaran 2024 jumlah anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. Rp. 14.938.879.927,00,-** dengan 10 Program, 19 Kegiatan dan 57 Sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kota Palangka Raya, pada dasarnya kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya adalah sebagai Unsur Pelaksana Kebijakan Teknis Daerah yang bersifat spesifik . Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, sebagai berikut :

1. Permasalahan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) Masih banyaknya OPD yang belum melakukan PUG
 - 2) Belum optimalnya sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 3) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 4) Belum maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak
 - 5) Ketersediaan Regulasi ditingkat instansi/lembaga terkait belum optimal

Rencana Kerja Tahun 2024

- 6) Pelaksanaan Forum Anak Belum Efektif
 - 7) Masih terbatasnya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
 - 8) Belum adanya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar
 - 9) Belum adanya Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar
 - 10) Jumlah layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak masih terbatas
 - 11) Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) masih terbatas
- b. Permasalahan terkait Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- 1). Masih Tingginya angka pertumbuhan penduduk
 - 2). Unmeetneed tinggi
 - 2). Angka Kelahiran Meningkat tapi perkawinan meningkat.
 - 3). Masih tingginya prevalensi *stunting*
 - 4). Masih rendahnya kesertaan KB yang menggunakan Metode Kontrasepsi Modern Jangka Panjang (MKJP)
 - 5). Pendataan hanya belum dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, pendataan masih belum sinergi antara pusat dengan daerah
 - 6). Masih terdapat pernikahan perempuan dibawah umur 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi
 - 7). Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan keluarga

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu peningkatan kinerja dan pemahaman masing-masing personil melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi	Arah Kebijakan
<p>1) Mengembangkan penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) 2) Meningkatkan dan mengembangkan SDM aparatur sebagai fasilitator PPRG di setiap SKPD dan di kabupaten/kota 3) Meningkatkan kualitas keluarga yang responsif gender 4) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, 5) Meningkatkan peran serta organisasi Perempuan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan 6) Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK)</p>	<p>1) Mengoptimalkan peran dan fungsi Pokja PUG dan Focal Point PUG SKPD. 2) Melaksanakan pelatihan SDM fasilitator PPRG di setiap SKPD dan di kabupaten/kota. 3) Melaksanakan Advokasi dan sosialisasi PUG di bidang politik 4) Melaksanakan sosialisasi hak konstitusional perempuan. 5) Meningkatkan kapasitas organisasi Perempuan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan 6) Melaksanakan pelatihan dan pembinaan keterampilan berusaha bagi perempuan</p>
<p>) Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan 2) Meningkatkan perlindungan hak perempuan kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko 3) Menyusun kebijakan/regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang. 4) Meningkatkan pelayanan UPT PPA. 5) Meningkatkan kapasitas SDM petugas terlatih pada UPT PPA dalam pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan dan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).</p>	<p>1) Menyusun peraturan/regulasi daerah terkait dengan pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan. 2) Mensosialisasikan kebijakan/regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan. 3) Menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan. 4) Meningkatkan koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan lainnya. 5) Meningkatkan sarana dan prasarana UPT PPA. 6) Melaksanakan sosialisasi/workshop dalam rangka pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan dan TPPO.</p>
<p>1) Meningkatkan koordinasi Pemangku kepentingan dalam Pemenuhan Hak Anak (PHA). 2) Mengembangkan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA). 3) Meningkatkan kapasitas SDM Gugus Tugas KLA 4) Meningkatkan perlindungan dan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha 5) Meningkatkan kualitas keluarga yang responsif hak anak 6) Meningkatkan pelibatan anak dalam proses pembangunan 7) Meningkatkan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak</p>	<p>1) Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi mengenai kebijakan hak sipil anak, pendidikan anak, kesehatan dasar anak dll. 2) Melaksanakan workshop bahaya pornoaksi/pornografi dan penanaman nilai-nilai luhur dalam rangka membangun karakter anak yang berkualitas. 3) Melaksanakan pembinaan dan pelatihan SDM lembaga PHA 4) Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang KLA. 5) Melaksanakan sosialisasi/workshop peningkatan kapasitas SDM Gugus Tugas KLA. 6) Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Forum Anak Daerah.</p>
<p>1) Meningkatkan pelaksanaan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pengendalian Penduduk (PP) 2) Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga</p>	<p>1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pengendalian Penduduk (PP) 2) Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengoptimalan KIE terkait peningkatan kualitas keluarga</p>
<p>1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan dedikasi kader. 2. Meningkatkan mutu pelayanan dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja 3. Meningkatkan peran serta dan kemitraan dalam penyelenggaraan dan pembiayaan Posyandu. 4. Menyediakan pilihan layanan sesuai kebutuhan 5. Sesuai urgensi fokus pada baduta. 6. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja untuk kegiatan pada hari "maupun kunjungan rumah 7. Membangun jejaring kemitraan antar organisasi masyarakat guna mendukung kegiatan Posyandu seperti : - Pelatihan. - Konsultasi. - Supervisi, evaluasi, dll.</p>	<p>1) Melaksanakan sosialisasi dan Pelatihan kepada Kader PKK dan Kader Posyandu 3) Mengoptimalkan peran dan fungsi kader serta pokjanal posyandu 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan Ibu dan Bayi 5) Memberikan Edukasi Pelayanan Gizi</p>

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SOPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya dengan Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pemberdayaan Masyarakat;

Rencana Kerja Tahun 2024

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan lingkup Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak; dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Pelaksanaan Administrasi lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kegiatan Kesekretariatan;
2. Pelaksanaan kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset;
3. Pelaksanaan Pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
4. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pengendalian Penduduk Mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakandi bidang Pengendalian Penduduk;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pengendalian penduduk
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang pengendalian penduduk
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang pengendalian penduduk; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang pengendalian penduduk; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang pengendalian penduduk; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melaksanakan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi

1. Perumusan Kebijakan Bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;

Rencana Kerja Tahun 2024

4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang pengendalian penduduk; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang berlaku.

Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya yang akan dipakai sebagai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Palangka Raya mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya;
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Analisis biaya dan manfaatnya belum sepenuhnya dilaksanakan dalam setiap pengajuan rencana kegiatan sehingga dampaknya menjadi tidak jelas.
2. Sering belum adanya kesesuaian antara program dengan rencana.
3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan.
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
5. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodir dalam perencanaan maupun penganggaran.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandaidengan capaian IDG.

2. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
4. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk
5. Tingginya Unmet need KB
6. Tingginya Prevalensi Stunting
7. Masih rendahnya penggunaan Kontrasepsi Modern Jangka Panjang (MKJP)
8. Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Sumber Daya Aparatur

a. Efisiensi dalam Penguatan Tata Kelola

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya melalui Pemerintah Kota Palangka Raya senantiasa melakukan penguatan tata Kelola sehingga semakin efektif dan efisien dalam bentuk organisasi yang semakin ramping, simpel dan melayani masyarakat dengan inovasi pelayanan publik yang baik. Bentuk efisiensi penggunaan sumberdaya organisasi dalam penguatan tata Kelola yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya adalah:

→ Penyederhanaan Birokrasi

Dalam rangka menindaklanjuti perkembangan kebijakan nasional, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya telah melaksanakan implementasi delayering yang mengalihkan semua Eselon IV sebagai Kepala Seksi menjadi Jabatan Fungsional yang dimuat dalam Keputusan Walikota

Rencana Kerja Tahun 2024

Palangka Raya Nomor 188.45/428/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Uraian Tugas Kelompok Sub-Subtansi dan Tugas Sub Koordinator Jabatan Fungsional di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya. Implementasi ini mengalihkan Eselon IV atau Inpassing Jabatan Fungsional.

b. Efisiensi Kinerja Anggaran atas Rencana Kerja

Perencanaan dan penganggaran Tahun 2023 diupayakan dengan penyempurnaan penganggaran berbasis kinerja untuk mewujudkan penerapan konsep money follow program. Efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun 2023 adalah:

1. Belanja Birokrasi seperti Belanja Honorarium, perjalanan dinas, pemeliharaan gedung kantor dan kendaraan dinas, dan sisa satuan harga penganggaran dibandingkan harga satuan riil.
2. Alokasi Gaji Pegawai dan tunjangan kinerja tambahan

Efisiensi anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dapat dilakukan dalam analisis Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Sarana dan Prasarana

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel lampiran.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan hasil musrenbang.

B A B III TUJUAN DAN SASARAN SOPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan daerah kab/kota.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang bersifat spesifik. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya mengacu pada Misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Tahun 2024-2026, yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

“MEWUJUDKAN KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, BERORIENTASI GLOBAL DENGAN BERKEARIFAN LOKAL, MENUJU TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERILMU, BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SEHAT DAN TERAMPIL”.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, mendukung Misi Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 terlihat pada tabel dibawah ini :

<p>MISI : MEWUJUDKAN KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, BERORIENTASI GLOBAL DENGAN BERKEARIFAN LOKAL, MENUJU TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERILMU, BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SEHAT DAN TERAMPIL</p>

Rencana Kerja Tahun 2024

Adapun Tujuan dan Sasaran yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, adalah :

Tujuan :

"Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas"

Sasaran :

Meningkatnya Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja (RENJA) Adapun Tujuan dan Sasaran yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, adalah :

Tujuan :

"Mewujudkan Keluarga Berkualitas"

Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Sasaran :

- 1. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk**
- 2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Lembaga Kemasyarakatan**

Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :

- 1) Meningkatkan pelaksanaan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pengendalian Penduduk (PP)
- 2) Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Mengembangkan penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG)
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan SDM aparatur sebagai fasilitator PPRG di setiap SKPD dan di kabupaten/kota
- 3) Meningkatkan kualitas keluarga yang responsif gender
- 4) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik,

Rencana Kerja Tahun 2024

- 5) Meningkatkan peran serta organisasi Perempuan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan
- 6) Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK).
- 6) Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan
- 7) Meningkatkan perlindungan hak perempuan kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko
- 8) Menyusun kebijakan/regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan
- 9) Meningkatkan koordinasi Pemangku kepentingan dalam Pemenuhan Hak Anak (PHA).
- 10) Mengembangkan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA).
- 11) Meningkatkan kapasitas SDM Gugus Tugas KLA
- 12) Meningkatkan perlindungan dan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha
- 13) Meningkatkan kualitas keluarga yang responsif hak anak
- 14) Meningkatkan pelibatan anak dalam proses pembangunan
- 15) Meningkatkan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak

Urusan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan dedikasi kader PKK dan Posyandu.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja
- 3) Meningkatkan peran serta dan kemitraan dalam penyelenggaraan dan pembiayaan Posyandu.
- 4) Menyediakan pilihan layanan sesuai kebutuhan
- 5) Sesuai urgensi fokus pada baduta.
- 6) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja untuk kegiatan pada hari "A" maupun kunjungan rumah
- 7) Membangun jejaring kemitraan antar organisasi masyarakat guna mendukung kegiatan Posyandu seperti : - Pelatihan. - Konsultasi. - Supervisi, evaluasi, dll.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kota Palangka Raya sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk merumuskan kebijakan operasional Dinas, merencanakan dan melaksanakan tugas urusan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, bersama-sama dengan instansi terkait sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Tahun 2024

Apabila dikaitkan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Palangka Raya, pada dasarnya kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya adalah sebagai Unsur Pelaksana kebijakan Teknis Daerah yang bersifat spesifik untuk setiap program pembangunan yang berorientasi menciptakan kemandirian masyarakat agar mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada, yang difasilitasi oleh Pemerintah serta seluruh pelaku pemberdayaan masyarakat.

Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024 yang ditetapkan secara menyeluruh dan terpadu serta memberikan kesatuan pandangan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas terdiri dari :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Fasilitasi Kunjungan Tamu
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

C. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PEMEHUNAHAN HAK ANAK

1. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

E. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan program kegiatan pencegahan KTA
2. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota

G. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan
2. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

H. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Peningkatan Kapasitas Forum Anak
2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

I. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
2. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana
3. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
5. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
6. Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
7. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
8. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
9. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

J. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

1. Pengendalian Program KKBPK
2. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
3. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
2. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
3. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
4. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
5. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
6. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
7. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
8. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
9. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
10. Pembinaan Terpadu Kampung KB
11. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

K. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
2. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Rencana Kerja Tahun 2024

3. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- 4.
5. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2024 membutuhkan masukan (inputs) berupa pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan perincian berdasarkan Program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-SOPD).

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RT/RW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

A. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. IDG dan dimensinya bersifat fluktuatif namun cenderung meningkat tiap tahun
2. Mewujudkan PUG menjadi sasaran utama dalam pembangunan;

Rencana Kerja Tahun 2024

3. Terwujudnya sistem data terpilah gender dan anak yang terintegrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara akurat dan terkini sehingga dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik berbasis Gender dan Anak.
 4. Mengoptimalkan pelaksanaan Kabupaten/kota Layak Anak;
 5. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
 6. Peningkatan pelayanan secara komprehensif melalui pemenuhan kapasitas SDM, sarana prasarana utama dan pendukung pada UPTD PPA.
- B. Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**
1. Masih tingginya angka pertumbuhan penduduk
 2. Masih tingginya Unmetneed KB
 3. Masih tingginya prevalensi *stunting*
 4. Masih rendahnya kesertaan KB yang menggunakan Metode Kontrasepsi Modern Jangka Panjang (MKJP)
 5. Meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan keluarga dalam melahirkan generasi yang berkualitas.
- B. Urusan Pemberdayaan Masyarakat**
- Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas di masyarakat.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya. Pada dasarnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya pada Tahun 2024. Target kinerja mempersentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan dalam organisasi didalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

1. SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya maupun kegiatan-kegiatan spesifik Dinas sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya. Dalam Tahun Anggaran 2024 program kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis.

2. INDIKATOR SASARAN TAHUN 2024

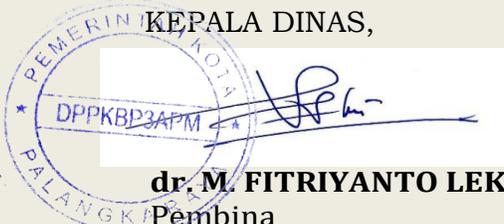
Sasaran dan kegiatan tahunan ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan kondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat, Pemerintah Daerah atau Instansi/Lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ikhtisar Target Kinerja masing-masing sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir. Indikator Kinerja Sasaran adalah merupakan target sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2024 yang disesuaikan dengan indikator / target kegiatannya, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara tercapainya target sasaran dengan target kegiatan dengan hal lain apabila kegiatan telah berhasil dicapai maka berarti sasaran juga telah dicapai.

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2024 direncanakan dengan harapan sejalan dengan aspirasi masyarakat yang telah dijangkau melalui mekanisme perencanaan “bottom up planning”, sehingga dapat direalisasikan secara efektif, efisien dan sesuai terhadap kebutuhan masyarakat luas.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya. RENJA juga memberikan masukan yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2024 agar dapat dilaksanakan, membutuhkan sumber daya untuk dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana pembiayaan. Dari aspek pendanaan (pembiayaan) jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 14.938.879.927,00** dengan sumber pendanaan dari APBD Kota Palangka Raya.

KEPALA DINAS,

dr. M. FITRIYANTO LEKSONO, M.Si
Pembina
NIP. 19820725 200901 1 005

Rencana Kerja Tahun 2024

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALANGKARAYA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						14.938.879.927,00								110.037.650,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.938.879.927,00							110.037.650,00		
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						7.115.446.929,00							110.037.650,00		
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DPPKBP3APM dan Jumlah Rekomendasi Hasil Tindak Lanjut di DPPKBP3APM					6.827.676.929,00						-	110.037.650,00		
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				32 Dokumen	130.627.350,00						-	110.037.650,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				22.00 Dokumen	110.037.650,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.037.650,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.00 Laporan	20.589.700,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			100%	5.862.423.456,00						-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

Rencana Kerja Tahun 2024



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14.00 Orang/bulan	5.084.514.068,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12.00 Dokumen	725.882.425,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	23.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				16.00 Laporan	29.026.963,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	86.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				64.00 Paket	56.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

Rencana Kerja Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6.00 Orang	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			100	209.370.007,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10.00 Paket	13.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				44.00 Paket	38.197.857,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				48000.00 Paket	15.029.550,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	10.560.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

Rencana Kerja Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.00 Laporan	9.998.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	122.583.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	168.912.800,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				30.00 Unit	168.912.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	114.992.316,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	8.499.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

Rencana Kerja Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	98.000.316,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	8.493.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	255.351.200,00			-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13.00 Unit	214.771.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5.00 Unit	13.680.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8.00 Unit	26.900.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-			-	40.000.000,00						-	0,00	
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	40.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				32.00 Perangkat Daerah	40.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	56.000.000,00						-	0,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	56.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				33.00 Perangkat Daerah	56.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-			-	98.000.000,00						-	0,00	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	98.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

Rencana Kerja Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				15.00 Dokumen	98.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	93.770.000,00						-	0,00	
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	93.770.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/														
			Jumlah SDM/ Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				12.00 Orang	93.770.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						3.644.206.398,00							0,00	
1.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	35.000.000,00						-	0,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	35.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				5.00 Orang	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														

Rencana Kerja Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				5.00 Dokumen	20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	3.609.206.998,00						-	0,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.609.206.998,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				3.00 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				9.00 Dokumen	1.875.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				25.00 Lembaga	340.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				8.00 Laporan	105.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				35.00 Dokumen	1.274.206.998,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.Persentase PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk 2.Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KAB	-			1 PKB/PLKB 30 OPD	184.552.000,00							0,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-				24.152.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				2.00 Dokumen	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana														

Rencana Kerja Tahun 2024

			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				4.00 Kegiatan	14.152.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*	*	*			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
--	--	--	---	--	--	--	---------------	---------------	--	--------------------------------------	---	---	---	--	--	------	---

Rencana Kerja Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEGIATAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	160.400.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1,00 Dokumen	6.700.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				9,00 Laporan	64.200.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				1,00 Dokumen	11.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				35,00 Laporan	48.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				5,00 Dokumen	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				25.00 Organisasi	80.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	66.000.000,00			-	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.03.2.02.0004	Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)															
			Jumlah Kader yang Mengikuti Pengerakan Kader institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				25.00 Orang	66.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	554.651.000,00			-	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya															
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				6.00 Laporan	88.200.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				120.00 Orang	144.303.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB															

Rencana Kerja Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SA SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				11.00 Unit	277.148.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				18.00 Laporan	45.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	739.473.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				19.00 Dokumen	48.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				5.00 Laporan	528.973.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				15.00 Kampung	162.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-			-	2.018.800.000,00						-	0,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	2.018.800.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				40.00 Unit	360.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				35.00 Orang	60.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				678.00 Orang	1.423.800.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)														

Rencana Kerja Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Aksesor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				15,00 Kelompok	175.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
J U M L A H															110.037.650,00		
								14.938.879.927,00									

KEPALA DINAS,


dr. M. FITRIYANTO LEKSONO, M.Si
Pembina
NIP. 19820725 200901 1 005